

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu parameter yang krusial dalam mengetahui pencapaian pembangunan negara. Setiap negara akan berusaha keras dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan untuk mencapai pembangunan di negara tersebut (Jonaidi, 2012). Kemiskinan juga menjadi permasalahan yang cukup rumit dan bersifat kompleks di Indonesia karena permasalahan kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial, budaya dan lainnya. Kemiskinan adalah suatu situasi dimana ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan makanan dan non makanan seperti kebutuhan pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Seseorang yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok karena tidak memiliki pendapatan yang cukup dan ketidakmampuan dalam memiliki sumber daya akan mengakibatkan orang tersebut berada di bawah garis kemiskinan (Aderma dkk., 2019).

Berdasarkan tabel 1.1 di bawah ini dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2019-2021 mengalami kenaikan penduduk miskin. Diketahui terdapat beberapa provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi daripada persentase penduduk miskin Indonesia. Tahun 2020 Pulau Sumatera mempunyai persentase penduduk miskin sebesar 9,49 persen, sedangkan Indonesia memiliki persentase penduduk miskin yaitu sebesar 10,19 persen. Di tahun 2021 Pulau Sumatera mempunyai persentase penduduk miskin sebesar 9,79 persen, sedangkan Indonesia memiliki persentase penduduk miskin yaitu sebesar 9,71 persen. Provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di tahun 2020 yaitu Provinsi Bengkulu dengan persentase penduduk miskin sebesar 15,03 persen, kemudian diikuti Provinsi Aceh sebesar 14,99 persen. Sedangkan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di tahun 2020 yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,53 persen, kemudian diikuti Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,92 persen.

Provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di tahun 2021 yaitu Provinsi Aceh sebesar 15,33 persen, kemudian diikuti Provinsi Bengkulu dengan persentase penduduk miskin sebesar 15,22 persen. Sedangkan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di tahun 2021 yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,90 persen, kemudian diikuti Provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,12 persen.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Sumatera dan Indonesia Tahun 2019-2021

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (persen)	
	2020	2021
Aceh	14,99	15,33
Sumatera Utara	8,75	9,01
Sumatera Barat	6,28	6,63
Riau	6,82	7,12
Jambi	7,58	8,09
Sumatera Selatan	12,66	12,84
Bengkulu	15,03	15,22
Lampung	12,34	12,62
Kep. Babel	4,53	4,90
Kep. Riau	5,92	6,12
Pulau Sumatera	9,49	9,79
Indonesia	10,19	9,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat bukan hanya sebagai tolak ukur dalam mengetahui keberhasilan perekonomian suatu daerah atau negara saja, namun diharapkan dapat memecahkan permasalahan dalam pembangunan diantaranya tingkat kemiskinan yang tinggi, ketimpangan pendapatan di masyarakat, dan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat (Aderma dkk., 2019). Pertumbuhan ekonomi adalah aspek penting bagi pembebasan masyarakat dari

kemiskinan, namun pertumbuhan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri dalam memberantas kemiskinan (Paramita. & Purbadharmaja, 2015).

Dapat diketahui nilai laju PDRB ADHK 2010 di tahun 2020-2021 pada setiap provinsi di Pulau Sumatera mengalami peningkatan yang cukup besar. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang memiliki nilai laju PDRB yang lebih besar diantara provinsi lainnya di tahun 2021 dimana memiliki nilai laju PDRB di tahun 2020 sebesar -2,30 persen menjadi 5,05 persen di tahun 2021. Provinsi Jambi mempunyai nilai laju PDRB sebesar -0,44 persen di tahun 2020 dan meningkat menjadi 3,66 persen. Provinsi Sumatera Selatan sebesar -0,11 persen di tahun 2020 dan sebesar 3,58 persen di tahun 2021. Selanjutnya Provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai laju PDRB sebesar -3,80 di tahun 2020 dan sebesar 3,43 persen di tahun 2021. Provinsi Riau dengan nilai laju PDRB sebesar -1,13 persen di tahun 2020 dan sebesar 3,36 persen di tahun 2021. Selanjutnya Provinsi Sumatera Barat memiliki nilai laju PDRB sebesar -1,62 persen di tahun 2020 dan sebesar 3,29 persen di tahun 2021. Provinsi Bengkulu sebesar -0,02 persen di tahun 2020 dan sebesar 3,24 persen di tahun 2021. Provinsi Aceh memiliki nilai laju PDRB sebesar -0,37 persen di tahun 2020 dan sebesar 2,79 persen di tahun 2021. Selanjutnya Provinsi Lampung memiliki nilai laju PDRB sebesar -1,67 persen di tahun 2020 dan sebesar 2,79 persen di tahun 2021. Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai laju PDRB sebesar -1,07 persen di tahun 2020 dan sebesar 2,61 persen di tahun 2021.

Arsyad (2010) mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya mampu dalam pengentasan kemiskinan karena masih terdapat dalam jumlah yang tidak sedikit penduduk yang berpendapatan dibawah standar kebutuhan hidup. Kemiskinan absolut yang besar tidak dapat dikurangi bahkan dihilangkan dengan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat dikatakan '*trickle down effects*' atau efek cucuran kebawah dari tujuan pertumbuhan ekonomi cenderung berjalan lambat bagi penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan suatu proses dari pergeseran struktur pertumbuhan ekonomi sektoral pada pembentukan PDRB maupun penyerapan tenaga kerja (Khafidzin and Istifadah, 2020).

Badan Pusat Statistik sejak tahun 2010 membagi sektor perekonomian ke dalam 17 sektor yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya (BPS, 2021).

Sektor pertanian memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk di negara-negara berkembang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dalam memenuhi kebutuhan negara, negara berkembang akan mengandalkan sektor pertanian negara mereka (Arsyad, 2010). Dengan terciptanya lapangan kerja yang meluas dan merata disertai tingkat ketahanan pangan yang meningkat sebagai dampak terjadinya pertumbuhan produktivitas sektor pertanian akan dapat menurunkan kemiskinan. Produktivitas sektor pertanian menjadi aspek penting bagi pengentasan kemiskinan dan kelaparan dari masyarakat disebabkan ketahanan pangan yang menguat akibat produktivitas sektor pertanian yang meningkat (Saputri, 2017).

Berdasarkan tabel 1.2 di bawah ini dapat diketahui produktivitas sektor pertanian di provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2018 dan tahun 2021 mengalami penurunan. Provinsi dengan produktivitas sektor pertanian tertinggi di tahun 2018 adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan produktivitas sebesar 326,38 juta rupiah/jiwa selanjutnya Provinsi Riau dengan produktivitas sebesar 303,46 juta rupiah/jiwa dan diikuti Provinsi Sumatera Utara dengan produktivitas sebesar 201,08 juta rupiah/jiwa, sedangkan provinsi dengan produktivitas sektor pertanian terendah di tahun 2018 yaitu Provinsi Sumatera Selatan dengan produktivitas sebesar 118,41 juta rupiah/jiwa kemudian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan produktivitas sebesar 131,42 juta rupiah/jiwa selanjutnya Provinsi Bengkulu dengan produktivitas sebesar 134,81 juta rupiah/jiwa. Pada tahun 2021 provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki produktivitas sektor pertanian tertinggi

yaitu Provinsi Riau dengan produktivitas pertanian sebesar 116,06 juta rupiah/jiwa, selanjutnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan produktivitas pertanian sebesar 57,56 juta rupiah/jiwa, kemudian Provinsi Sumatera Utara dengan produktivitas pertanian sebesar 56,50 juta rupiah/jiwa, sedangkan provinsi dengan produktivitas sektor pertanian terendah di tahun 2021 yaitu Provinsi Bengkulu dengan produktivitas pertanian sebesar 28,02 juta rupiah/jiwa, kemudian Provinsi Sumatera Selatan dengan produktivitas pertanian sebesar 29,17 juta rupiah/jiwa, selanjutnya Provinsi Lampung dengan produktivitas pertanian sebesar 36,90 juta rupiah/jiwa.

Tabel 1.2 Produktivitas Sektor Pertanian Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2018 dan 2021

Provinsi	PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian (milliar rupiah)		Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Sektor Pertanian (ribu orang)		Produktivitas Sektor Pertanian (juta rupiah/jiwa)	
	2018	2021	2018	2021	2018	2021
Aceh	35426	37768	207,655	853,153	170,600	44,269
Sumut	127203	141601	632,568	2506,230	201,090	56,500
Sumbar	36649	38815	228,896	895,668	160,112	43,336
Riau	124600	141058	410,585	1215,318	303,469	116,067
Jambi	37979	41235	243,892	801,702	155,721	51,434
Sumsel	50588	54835	427,200	1879,516	118,418	29,175
Bengkulu	12309	13110	91,300	467,830	134,819	28,023
Lampung	66966	68038	429,775	1843,505	155,816	36,907
Kep. Babel	9592	10784	72,983	187,328	131,428	57,567
Kep. Riau	5776	5322	17,697	97,868	326,383	54,379

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Proses industrialisasi telah mengakibatkan pergeseran fokus pemerintah dalam aktivitas ekonomi dimana terjadi peralihan sektor pertanian kepada sektor industri. Menurut Arsyad (2010) sektor industri merupakan sektor pemimpin (*leading sector*) dimana dengan adanya pembangunan industri mampu mendorong pembangunan sektor lainnya. Sektor industri menjadi sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian dikarenakan *term of trade* atau dasar tukar produk industri yang lebih tinggi, variasi produk yang dihasilkan lebih beragam dan nilai tambah yang dimiliki produk industri lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian.

Diketahui berdasarkan tabel 1.3 dibawah ini bahwa produktivitas sektor industri di provinsi di Pulau Sumatera mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2021. Provinsi dengan produktivitas sektor industri tertinggi di tahun 2018 adalah Provinsi Riau dengan produktivitas industri sebesar 1108,96 juta rupiah/jiwa kemudian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan produktivitas industri sebesar 489,19 juta rupiah/jiwa dan selanjutnya Provinsi Kepulauan Riau dengan produktivitas industri sebesar 381,18 juta rupiah/jiwa. Selain itu provinsi dengan produktivitas sektor industri terendah di tahun 2018 yaitu Provinsi Aceh dengan produktivitas industri sebesar 101,12 juta rupiah/jiwa, kemudian Provinsi Bengkulu dengan produktivitas industri sebesar 167,33 juta rupiah/jiwa, selanjutnya Provinsi Sumatera Barat dengan produktivitas industri sebesar 202,38 juta rupiah/jiwa. Pada tahun 2021 produktivitas sektor industri tertinggi terdapat di Provinsi Riau dengan produktivitas industri sebesar 630,59 juta rupiah/jiwa, selanjutnya Provinsi Kepulauan Riau dengan produktivitas industri sebesar 279,19 juta rupiah/jiwa dan Provinsi Sumatera Selatan dengan produktivitas industri sebesar 229,08 juta rupiah/jiwa, sedangkan provinsi dengan produktivitas sektor industri terendah di tahun 2021 adalah Provinsi Aceh dengan produktivitas industri sebesar 31,47 juta rupiah/jiwa selanjutnya Provinsi Bengkulu dengan produktivitas industri sebesar 47,41 juta rupiah/jiwa dan Provinsi Sumatera Barat dengan produktivitas industri sebesar 71,92 juta rupiah/jiwa.

Tabel 1.3 Produktivitas Sektor Industri Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2018 dan 2021

Provinsi	PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Sektor Industri (miliar rupiah)		Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Sektor Industri (ribu orang)		Produktivitas Sektor Industri (juta rupiah/jiwa)	
	2018	2021	2018	2021	2018	2021
Aceh	6410	6212	63,385	197,345	101,128	31,478
Sumut	96175	97928	444,340	682,605	216,445	143,462
Sumbar	16447	16621	81,268	231,074	202,380	71,929
Riau	144761	162437	130,537	257,595	1108,965	630,591
Jambi	15137	15711	52,483	83,099	288,417	189,064
Sumsel	56206	60641	160,376	264,710	350,464	229,085
Bengkulu	2719	2778	16,249	58,588	167,333	47,416
Lampung	43234	46338	195,780	397,915	220,830	116,452
Kep. Babel	11792	11870	24,105	53,363	489,193	222,439
Kep. Riau	65019	75925	170,571	271,944	381,184	279,194

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Kelebihan tenaga kerja yang diakibatkan adanya pengangguran terselubung baik di sektor pertanian maupun industri akan berdampak pada penurunan produktivitas tenaga kerja (Saputri, 2017). Disamping itu, pertumbuhan produktivitas sektor pertanian dan industri yang tiada disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan akan berdampak pada perbedaan jumlah yang diterima di lingkungan masyarakat. Nilai perbedaan pendapatan baik besar atau kecilnya tersebut mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan atau ketimpangan di daerah tersebut (Permana, 2016).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik dapat diketahui bahwa nilai gini ratio provinsi di Pulau Sumatera berfluktuasi selama tahun 2020-2021. Provinsi dengan

nilai gini ratio tertinggi hingga terendah selama tahun 2020-2021 yaitu Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,338 di tahun 2020 dan sebesar 0,340 di tahun 2021, selanjutnya Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,334 di tahun 2020 dan sebesar 0,339 di tahun 2021, kemudian Provinsi Bengkulu dengan gini ratio sebesar 0,323 di tahun 2020 dan sebesar 0,321 di tahun 2021, selanjutnya Provinsi Riau sebesar 0,321 di tahun 2020 dan sebesar 0,327 di tahun 2021, kemudian Provinsi Lampung sebesar 0,320 di tahun 2020 dan sebesar 0,314 di tahun 2021, selanjutnya Provinsi Aceh sebesar 0,319 di tahun 2020 dan meningkat sebesar 0,323 di tahun 2021, selanjutnya Provinsi Jambi sebesar 0,316 di tahun 2020 dan sebesar 0,315 di tahun 2021, selanjutnya Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,314 di tahun 2020 dan sebesar 0,313 di tahun 2021, kemudian Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,301 di tahun 2020 dan sebesar 0,300 di tahun 2021, kemudian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,257 di tahun 2020 dan sebesar 0,247 di tahun 2021. Provinsi dengan nilai gini ratio terendah menunjukkan ketimpangan pendapatan yang rendah di provinsi tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketimpangan pendapatan yang tinggi di sebuah provinsi dapat ditunjukkan oleh nilai gini ratio yang tinggi di provinsi tersebut.

Menurunnya daya beli terhadap barang dan jasa oleh masyarakat sebagai akibat ketimpangan pendapatan dapat mengakibatkan terhambatnya produksi barang dan jasa sehingga pertumbuhan ekonomi juga terhambat. Output barang dan jasa yang terbatas di masyarakat dapat berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang terbatas sehingga tidak semua masyarakat dapat bekerja dan memperoleh pendapatan yang akan berakhir pada penambahan tingkat kemiskinan (Rahmadi & Parmadi, 2019). Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Produktivitas Sektoral Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Provinsi Di Pulau Sumatera”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kemiskinan provinsi di Pulau Sumatera tahun 2014-2021?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, produktivitas sektor pertanian, produktivitas sektor industri, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan provinsi di Pulau Sumatera tahun 2014-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan kemiskinan provinsi di Pulau Sumatera tahun 2014-2021.
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, produktivitas sektor pertanian, produktivitas sektor industri dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan provinsi di Pulau Sumatera tahun 2014-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan tercapainya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diinginkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan dan pengembangan terkait kemiskinan.
 - b) Dapat menjadi media tambahan informasi dan wawasan secara teoritis mengenai pertumbuhan ekonomi, produktivitas sektoral (pertanian dan industri), ketimpangan pendapatan, serta kemiskinan provinsi di Pulau Sumatera.
2. Manfaat Praktis
 - a) Sebagai sarana bagi peneliti untuk meningkatkan dan melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
 - b) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan terkait kemiskinan provinsi di Pulau Sumatera.

- c) Sebagai bacaan literatur bagi peneliti selanjutnya yang hendak melaksanakan kajian terkait persoalan kemiskinan dengan melihat hubungannya dari pertumbuhan ekonomi, produktivitas sektoral dan ketimpangan pendapatan provinsi di Pulau Sumatera sehingga dapat menambah pengaruh dari faktor-faktor lainnya sebagai pengembangan kajian tentang kemiskinan.